**ANALISIS PERBANDINGAN PERAN NOTARIS DALAM PENDIRIAN
BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) SEBELUM DAN SESUDAH
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**Sarah Jasmine Syafitri¹, Aad Rusyad Nurdin²
Universitas Indonesia**

Email: sarahjasminesya@gmail.com¹, aad.rusyad@ui.ac.id²

Abstrak

Lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja mengubah Badan Usaha Milik Desa dari semula merupakan badan usaha yang bercirikan desa menjadi suatu badan hukum. Pendiriannya dilakukan dengan ditetapkan Peraturan Desa yang kemudian didaftarkan kepada Menteri melalui sistem informasi Desa, sehingga untuk memperoleh status badan hukumnya Badan Usaha Milik Desa tidak memerlukan akta pendirian Notaris. Penelitian ini membahas mengenai perbandingan peran Notaris dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa Sebelum dan Sesudah berlakunya Undang-Undang Cipta kerja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penelitian doktrinal yaitu dengan melakukan studi kepustakaan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa sebelum dan sesudah Undang-Undang Cipta kerja memiliki peranan yang berbeda, di mana sebelum Undang-Undang Cipta Kerja, Notaris berperan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa untuk memperoleh status sebagai badan hukum yang memiliki legalitas yang kuat dengan dibuatkannya akta pendirian Badan Usaha Milik Desa. Namun, setelah Undang-Undang Cipta kerja peran tersebut berubah, karena dalam memperoleh status badan hukumnya Badan Usaha Milik Desa tidak memerlukan akta pendirian notaris untuk memperolehnya.

Kata Kunci : Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), Notaris, Akta Pendirian.

Abstract

The enactment of the Job Creation Law changed Village-Owned Enterprises from being business entities with village characteristics to becoming legal entities. Its establishment is carried out by stipulating Village Regulations which are then registered with the Minister through the Village information system, so that to obtain legal entity status as a Village-Owned Enterprise does not require a Notarial deed of establishment. This research discusses the comparison of the role of Notaries in the establishment of Village-Owned Enterprises Before and After the enactment of the Job Creation Law. The research method used in writing this article is a doctrinal research method, namely by conducting a literature study. The results of the research show that the role of the Notary in the Establishment of Village-Owned Enterprises before and after the Job Creation Law had a different role, where before the Job Creation Law, the Notary played a role in the establishment of Village-Owned Enterprises to obtain status as a legal entity. has strong legality by making a deed of establishment of a Village-Owned Enterprise. However, after the Job Creation Law, this role changed, because in obtaining legal entity status, a Village-Owned Enterprise does not require a notarial deed of establishment to obtain it.

Keywords: Village Owned Enterprise (BUM Desa), Notary, Deed of Establishment

PENDAHULUAN

Peran Notaris seharusnya memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menjalankan sebagian fungsi publik dari negara. Hal ini disebabkan karena Notaris berwenang untuk membuat suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagai suatu alat bukti, contohnya yaitu pembuatan akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Namun, pada faktanya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, pendirian Badan Usaha Milik Desa hanya dengan melakukan pendaftaran kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar memiliki kekuatan hukum yang kuat sebagai suatu badan usaha berbadan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Amandemen ke-3. Terdapat tiga unsur penting dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, yaitu dengan adanya keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Selain tiga unsur tersebut, UUD 1945 juga menyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip welfare state atau negara kesejahteraan, yang memiliki tujuan sebesar-sebesarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia. Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan prinsip-prinsip tersebut dilakukan upaya untuk pembangunan terhadap desa beserta tata kelolanya yaitu melalui pemerintah tingkat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (selanjutnya disebut Kemendes PDTT) diberikan amanah untuk memaksimalkan pembangunan ekonomi desa melalui pendirian dan pengelolaan BUM Desa.

UU Desa menyebutkan dalam Pasal 87, bahwa:

1. Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa atau yang disebut BUM Desa;
2. BUM Desa dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong;
3. BUM Desa dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Selain itu, dalam Pasal 88 UU Desa juga mengatur tata cara pendirian BUM Desa yang dilakukan melalui kesepakatan dalam musyawarah desa yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Namun, UU Desa dinilai masih memiliki kelemahan mengenai aturan terkait BUM Desa salah satunya tentang jenis badan usaha yang dimiliki oleh BUM Desa. Berdasarkan Pasal 1 angka 6 UU Desa menyebutkan bahwa:

“Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.”

BUM Desa hanya disebut sebagai badan usaha yang bercirikan desa, sehingga membuat kedudukan BUM Desa tidak memiliki legalitas yang kuat seperti badan hukum lainnya, yang membuat BUM Desa mengalami kesulitan untuk mendapatkan permodalan dari bank dan kerjasama dengan pihak lain.

Pemerintah menyadari adanya kesulitan dan hambatan dalam pelaksanaan BUM Desa sebagai badan usaha, sehingga Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ciptaker) yang mengatur dan mengubah berbagai sektor termasuk aturan mengenai BUM Desa. Selain itu, terdapat peraturan pelaksana dari UU Ciptaker mengenai BUM Desa yang mengatur mengenai bentuk usaha dan pendirian BUM Desa

yaitu dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Upaya pemerintah untuk mempercepat kemajuan Indonesia salah satunya dengan dibentuknya UU Ciptaker dengan mendorong pertumbuhan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. UU Ciptaker juga memberikan kesempatan kepada BUM Desa sebagai program Pemerintah Desa agar dalam pelaksanaan operasionalnya dapat berjalan dengan lebih maksimal dan berkembang pesat guna mengembangkan perekonomian masyarakat desa.

Pendirian BUM Desa dengan didasari kesepakatan dalam musyawarah desa yang ditetapkan menjadi Peraturan Desa, maka pendirian BUM Desa berbeda dengan badan hukum ataupun badan usaha lainnya, yang didirikan dengan dibuatkannya akta pendirian oleh Notaris. Dalam menjalankan kegiatan usahanya terlebih ketika berhubungan dengan pihak ketiga, pihak yang akan melakukan hubungan hukum dengan BUM Desa dalam melakukan kerja sama meminta pendirian BUM Desa dengan disahkan dengan akta Notaris, hal tersebut membuat BUM Desa tidak bisa bergerak secara luas dan tidak bisa berkembang karena tidak ada legalitas yang kuat untuk mendukung melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga.

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) menjelaskan, Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris atau berdasarkan undang-undang lainnya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum memiliki arti kewenangan yang ada pada Notaris tidak diberikan kepada pejabat lainnya atau bukan menjadi kewenangan pejabat lainnya dalam membuat akta autentik. Kewenangan Notaris diatur dalam Pasal 15 UUNJ, disamping Pasal 15 UUNJ juga terdapat kewenangan yang ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan lain di luar UUNJ, dalam arti peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, menegaskan agar perbuatan hukum tertentu wajib dibuat dengan akta Notaris seperti akta pendirian Perseroan Terbatas yang diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Akta autentik yang dibuat oleh Notaris akan menjelaskan mengenai hak dan kewajiban secara jelas, menjamin kepastian hukum yang kemudian akan meminimalisir terjadinya sengketa. Alat bukti berupa Akta Autentik tersebut sangat dibutuhkan dalam berbagai hubungan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihaknya, termasuk hal-hal yang terkait dengan BUM Desa dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal tersebut dapat menimbulkan pemahaman bahwa peran Notaris dalam pendirian BUM Desa adalah penting dikarenakan akta pendirian Notaris seharusnya merupakan satu-satunya landasan pendirian yang dapat memberikan kepastian hukum dan dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam hukum positif di Indonesia. Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Perbandingan Peran Notaris dalam Pendirian BUM Desa Sebelum dan Sesudah UU Ciptaker.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum doctrinal research. Menurut Abdulkadir Muhammad, pada pokoknya doctrinal research berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum guna menjawab isu hukum yang dianalisis. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan pustaka Pendekatan yang digunakan di dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Peter Mahmud Marzuki, menyatakan bahwa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang dibahas.

Dalam penelitian hukum, umumnya bahan hukum yang digunakan terdiri dari dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur- literatur

hukum, penelitian, tesis, disertasi, artikel, jurnal-jurnal hukum, kamus hukum, media internet ataupun komentar-komentar atas putusan pengadilan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Bahan-bahan hukum yang dikumpulkan tersebut adalah bahan hukum yang relevan untuk menjawab isu hukum.

PEMBAHASAN

1. Peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sebelum Undang-Undang Cipta Kerja

Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut BUM Desa) merupakan suatu badan usaha yang bercirikan desa yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna pengelolaan aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Bentuk Usaha BUM Desa yaitu badan usaha yang bercirikan desa sehingga bentuknya berbeda dengan badan hukum lainnya dan mempunyai organ kepengurusan yang berbeda, karena memiliki karakteristiknya sendiri, hal ini sesuai dengan Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa.

Mengenai BUM Desa tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selanjutnya disebut Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Permendesa 4/2015). BUM Desa juga merupakan amanat dari Pasal 87 UU Desa yang menyatakan bahwa suatu desa dapat mendirikan BUM Desa yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Bidang usaha yang dapat dijalankan oleh BUM Desa yaitu bidang Ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Modal awal BUM Desa dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) di mana, dalam hal ini Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dapat menyalurkan bantuan kepada BUM Desa melalui APB desa tersebut. Modal BUM Desa terdiri atas:

- a. Penyertaan modal desa, yang merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan; dan
- b. Penyertaan modal masyarakat desa, yang berasal dari tabungan masyarakat ataupun dari simpanan masyarakat desa.

Kepengurusan BUM Desa berdasarkan Permendesa 4/2015 terdiri atas penasihat yang dijabat secara langsung atau secara *ex officio* oleh Kepala Desa yang terlebih dahulu dipilih oleh penduduk desa berdasarkan pemilihan, Namun kepengurusannya dalam BUM Desa tersebut tidak perlu ada pengangkatan terlebih dahulu. Selain itu terdapat Pelaksana Operasional dan Pengawas, di mana Pelaksana operasional dijabat oleh masyarakat untuk mengurus dan mengelola BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Pengawas melakukan kepengurusan dalam BUM Desa untuk mengawasi pengelolaan BUM Desa dan dijabat oleh salah satu anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD).

Pendirian BUM Desa didirikan berdasarkan Peraturan Desa, yang disepakati melalui musyawarah Desa, yang hasilnya akan dijadikan pedoman oleh Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) untuk ditetapkan Perdes BUM Desa. Peraturan Desa tersebut dibuat dengan didasarkan pada tata perundang-undangan yang berlaku dan mengacu pada kesepakatan yang terbangun dalam masyarakat desa. BUM Desa merupakan badan usaha yang bercirikan desa dan pendiriannya cukup dengan ditetapkannya Peraturan Desa, namun Pendiannya tersebut dapat dilakukan dihadapan Notaris. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyatakan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang

lainnya.”

Notaris dalam membuat akta autentik bukan hanya diharuskan oleh undang-undang melainkan juga kehendak dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menjamin kepastian hukum dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak yang berkepentingan. Notaris bertugas menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan berwenang untuk membuat akta autentik sebagai alat bukti dengan kekuatan pembuktian yang sempurna salah satunya yaitu dapat membuat akta pendirian BUM Desa. Peran notaris dalam pendirian BUM Desa merupakan hal penting karena akta pendirian yang dibuat oleh Notaris adalah alat bukti yang sah dalam hukum positif Indonesia dan satu-satunya landasan pendirian yang dapat memberikan kepastian hukum. Namun, berdasarkan Permendesa 4/2015 pendiriannya tersebut tidak diwajibkan dengan akta Notaris cukup dengan Peraturan Desa. Oleh karena itu, Notaris memiliki peran untuk memberikan status badan hukum bagi BUM Desa melalui pembuatan Akta Pendirian Notaris yang setelah itu akan disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dan diumumkan dalam Berita Negara, sehingga pendiriannya tersebut menjadikan BUM desa sebagai badan hukum yang memiliki legalitas yang kuat. Peran Notaris dalam BUM Desa selain menjadikannya sebagai badan hukum yang memiliki legalitas yang kuat, Notaris juga dapat membuat akta terkait unit usaha BUM Desa, di mana dapat berupa badan hukum maupun non badan hukum dan memiliki landasan hukum yang berbeda dan terpisah dengan BUM Desa itu sendiri. Unit usaha BUM Desa dapat berupa Perseroan Terbatas dan Lembaga Keuangan Mikro, di mana pendirian dan pengelolaannya tersebut akan mengikuti aturan terkait badan hukum tersebut yaitu Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang tentang Lembaga Keuangan Mikro. Selain itu, peran Notaris dalam BUM Desa dapat membuat akta autentik yang disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) UUJN tentang kewenangan Notaris yaitu mengenai segala perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik terkait BUM Desa dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum. Berdasarkan pengaturan tersebut di atas, Notaris dapat berperan dan terlibat dalam pendirian maupun pengelolaan BUM Desa yaitu antara lain:

1. Notaris dapat membuat akta pendirian BUM Desa yang ingin menjadikan badan usahanya sebagai badan hukum;
2. Notaris dapat membuat akta pendirian unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum dalam bentuk usaha PT maupun LKM;
3. Notaris dapat membuat perjanjian kerja sama antara BUM Desa dengan pihak ketiga lainnya apabila dikehendaki oleh para pihak untuk dituangkan dalam bentuk akta Notaris;
4. Notaris dapat membuat berita acara rapat BUM Desa apabila para pihak yang bersangkutan menghendakinya;
5. Notaris dapat membuat perjanjian kredit bagi BUM Desa berbadan hukum yang hendak melakukan kerja sama kredit dengan pihak perbankan;
6. Notaris dapat membuat akta Notaris terkait segala kegiatan usaha BUM Desa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kepentingan umum.

2. Peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

Lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Ciptaker), menyebabkan perubahan aturan mengenai badan usaha, salah satunya adalah BUM Desa. Berdasarkan UU Ciptaker tersebut pengertian BUM Desa diubah menjadi:

“Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.”

Berdasarkan hal tersebut UU Ciptaker menyatakan bahwa BUM Desa bukan lagi badan usaha yang bercirikan desa melainkan merupakan suatu badan hukum. Selain itu, dari definisi tersebut BUM Desa memiliki tujuan dan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa dan dapat dipahami bahwa konsep tersebut memiliki potensi yang dapat mengembangkan ekonomi masyarakat desa dengan kegiatan usaha dalam bidang bisnis. Status badan hukum BUM Desa berdasarkan UU Ciptaker tersebut bertujuan agar BUM Desa mempunyai legalitas yang kuat sehingga dapat melakukan kerja sama dengan badan hukum lain dan dapat memperoleh pinjaman dari bank untuk kegiatan usaha BUM Desa.

UU Ciptaker mengatur dan mengubah beberapa ketentuan tentang Desa dan mempunyai peraturan pelaksana dan peraturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (PP BUM Desa) dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Desa Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa (selanjutnya disebut Permendesa BUM Desa No. 3/2021).

Pendirian BUM Desa setelah UU Ciptaker tetap dilakukan berdasarkan musyawarah dan didirikan dengan Peraturan Desa dalam hal didirikan oleh satu desa, namun dalam hal didirikan oleh dua desa atau lebih maka dilakukan dengan musyawarah dan didirikan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. Peraturan Desa tersebut harus didaftarkan kepada Kemenkumham agar BUM Desa memperoleh status badan hukumnya. Setelah didaftarkan, Kemenkumham akan mengeluarkan sertifikat pendaftaran secara elektronik yang menjadi dasar bahwa BUM Desa tersebut merupakan badan hukum. Di mana proses pendaftarannya tersebut terlebih dahulu didaftarkan pada sistem Informasi Desa milik Kementerian Desa PDTT yang akan dilanjutkan kepada sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham.

Pendirian BUM Desa setelah berlakunya UU Ciptaker dilakukan tanpa memerlukan Akta Notaris untuk menjadikan BUM Desa tersebut sebagai badan hukum, melainkan hanya dengan mendaftarkannya ke Kemenkumham. Namun, dalam hal ini Notaris dapat berperan dalam pembuatan akta-akta yang terkait dengan unit usaha BUM Desa yang berbadan hukum, di mana berdasarkan Pasal 73 ayat (6) PP BUM Desa yang menyatakan bahwa BUM Desa dapat mendirikan unit usahanya dengan bidang usahanya masing-masing yang merupakan satu-kesatuan dengan BUM Desa tersebut. Unit usaha tersebut dapat berbentuk Perseroan Terbatas atau Lembaga Keuangan Mikro sehingga dalam pengelolaan dan pendiriannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dan aturan mengenai Lembaga Keuangan Mikro, di mana dalam pendiriannya harus menggunakan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. Selain itu, Notaris juga berwenang membuat akta autentik terkait BUM Desa yang disebutkan pada Pasal 15 ayat (1) UUN.

3. Analisis Perbandingan Peran Notaris dalam Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebelum dan Sesudah Undang-Undang Cipta Kerja

Pengaturan BUM Desa sebelum dan sesudah UU Ciptaker mengalami perubahan yang cukup signifikan, Namun masih terdapat hal-hal yang tetap berlaku dan sama, salah satunya yaitu dalam hal pendirian BUM Desa di mana tata cara pendiriannya tetap sama, yaitu dengan dilakukannya musyawarah yang menjadi dasar ditetapkannya suatu Peraturan Desa. Selain itu, terkait peran Notaris dalam BUM Desa baik sebelum maupun setelah UU Ciptaker notaris tetap memiliki perannya dalam membuat akta terkait unit usaha BUM Desa yang dapat berbentuk Perseroan Terbatas ataupun Lembaga Keuangan Mikro sehingga dalam pengelolaan dan pendiriannya tunduk kepada peraturan perundang-undangan mengenai Perseroan Terbatas dan aturan mengenai Lembaga

Keuangan Mikro, di mana dalam pendiriannya harus menggunakan Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris. Sedangkan, salah satu perbedaannya terdapat pada definisi BUM Desa itu sendiri, di mana sebelum UU Ciptaker BUM Desa berdasarkan UU Desa memiliki definisi sebagai badan usaha yang bercirikan desa, namun setelah adanya UU Ciptaker definisi tersebut berubah dan BUM Desa menjadi badan usaha yang berbadan hukum.

Perbedaan lainnya yaitu menyangkut Peran Notaris dalam BUM Desa, di mana sebelum adanya UU Ciptaker, Notaris memiliki Peran menjadikan BUM Desa sebagai badan hukum yang memiliki legalitas yang kuat, tetapi setelah UU Ciptaker lahir peran tersebut hilang karena BUM Desa dalam memperoleh status badan hukumnya cukup dengan pendaftaran yang dilakukan ke Kemenkumham tanpa dibuatkannya akta pendirian Notaris. Kemudian terdapat perbedaan lain, di mana sebelum berlakunya UU Ciptaker banyak BUM Desa berbadan hukum yang menggunakan akta autentik Notaris dalam pendiriannya meskipun undang-undang tidak mengharuskan adanya penggunaan akta pendirian Notaris pada BUM Desa. Adanya keterlibatan peran Notaris dalam pembuatan akta pendirian oleh Notaris bagi BUM Desa memberikan kepastian bentuk usaha BUM Desa agar dapat menjadi badan hukum, yang untuk selanjutnya mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham agar memperoleh statusnya sebagai badan hukum. Namun, pada faktanya terdapat beberapa BUM Desa yang didirikan dengan akta notaris dalam bentuk akta perkumpulan dan memperoleh pengesahan dari Kemenkumham, hal ini sangat bertentangan dengan penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa yang menyatakan bahwa BUM Desa badan usaha yang memiliki bentuk yang berbeda dari badan hukum lainnya.

UU Ciptaker memberikan kejelasan terkait proses pendirian BUM Desa sebagai badan hukum sehingga tidak menimbulkan kebingungan terkait legalitas yang harus dimiliki oleh BUM Desa. BUM Desa saat ini memiliki status badan usaha yang pasti yaitu merupakan badan hukum dan hanya memerlukan Perdes dalam pendiriannya, serta memerlukan Sertifikat Pendaftaran yang diterbitkan oleh Kemenkumham melalui Sistem Administrasi Badan Hukum sebagai bentuk pengesahan BUM Desa sebagai suatu badan hukum. Walaupun sekarang Peran Notaris sudah tidak diperlukan dalam menjadikan BUM Desa sebagai badan hukum, Notaris tetap memiliki perannya dalam membuat akta-akta terkait unit usaha BUM Desa, di mana dapat berupa badan hukum maupun non badan hukum dan memiliki landasan hukum yang berbeda dan terpisahkan dengan BUM Desa itu sendiri.

Perbedaan lainnya, saat ini BUM Desa dalam pendiriannya wajib di daftarkan, di mana proses pendaftarannya tersebut terlebih dahulu didaftarkan pada sistem Informasi Desa milik Kementerian Desa PDTT yang akan dilanjutkan kepada sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham. Hal ini dilakukan agar BUM Desa memperoleh statusnya sebagai badan hukum sehingga memiliki legalitas yang kuat. Sebelum UU Ciptaker pendirian BUM Desa cukup dengan ditetapkannya peraturan desa dan tidak wajib didaftarkan ke kemenkumham seperti saat ini.

Sebelum adanya UU Ciptaker pendirian BUM Desa yang hanya cukup dengan Peraturan Desa, tentunya memiliki kekurangan karena sering menimbulkan kendala ketika BUM Desa hendak melakukan hubungan hukum maupun kerja sama dengan pihak lain karena tidak memiliki legalitas yang kuat. Akan tetapi, BUM Desa yang hendak menjadikan badan usahanya sebagai badan hukum dapat menggunakan akta pendirian Notaris, sehingga Notaris memiliki peran terhadap pendirian BUM Desa dan menjadikan BUM Desa sebagai Badan Hukum yang memiliki legalitas yang kuat. Undang-undang pada awalnya tidak mengakomodasi ketentuan mengenai legalitas bentuk usaha BUM Desa apabila hendak menjadi badan usaha yang berbadan hukum. Masyarakat pada umumnya hanya mengetahui bahwa akta Notaris adalah satu-satunya legalitas pendirian yang sah bagi badan hukum. Oleh karena itu, dapat ditemukan beberapa BUM Desa yang membuat akta pendirian Notaris sebagai bentuk legalitas terhadap pendiriannya sebagai badan hukum.

Kekurangan lainnya sebelum adanya UU Ciptaker yaitu banyak kekeliruan yang dilakukan oleh Notaris dengan membuat akta Pendirian BUM Desa berupa badan hukum perkumpulan. Hal

tersebut diketahui pada pemesanan nama perkumpulan, di mana banyak perkumpulan yang menggunakan rangkaian kata Badan Usaha Milik Desa, sedangkan UU Desa sudah menyatakan bahwa BUM Desa berbeda dengan badan hukum lainnya yaitu badan usaha yang bercirikan desa.

Pasca UU Ciptaker dan PP BUM Desa No. 11/2021 menjadikan BUM Desa sebagai badan hukum, sehingga kelebihanannya BUM Desa memiliki legalitas yang kuat dan dapat membuka peluang yang besar bagi BUM Desa untuk melakukan kerja sama dengan badan hukum lain dan dapat memperoleh pinjaman dari bank untuk menunjang kegiatan usaha BUM Desa. Namun, kekurangannya Notaris tidak lagi memiliki peran terkait legalitas pendirian BUM Desa karena status badan hukum BUM Desa dapat langsung diperoleh tanpa akta pendirian Notaris.

KESIMPULAN

Peran Notaris dalam Pendirian BUM Desa sebelum dan sesudah UU Ciptaker memiliki Peranan yang berbeda, di mana sebelum berlakunya UU Ciptaker Notaris berperan dalam pendirian Badan Usaha Milik Desa untuk memperoleh status sebagai badan hukum yang memiliki legalitas yang kuat dengan dibuatkannya akta pendirian Badan Usaha Milik Desa dan didaftarkan ke Kemenkumham. Namun, setelah UU Ciptaker peran tersebut berubah karena BUM Desa dalam memperoleh status badan hukumnya cukup dengan pendaftaran yang dilakukan ke Kemenkumham tanpa dibuatkannya akta pendirian Notaris. Tetapi, Notaris tetap memiliki perannya dalam membuat akta-akta terkait unit usaha BUM Desa seperti yang diatur sebelum berlakunya UU Ciptake.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UUD 1945. LN Tahun 1959 No. 75.
Undang-Undang Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, UU Nomor 6 Tahun 2023. LN Tahun 2023 No. 41 TLN No. 6856.
Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, UU Nomor 2 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 3 TLN No. 5491.
Undang-Undang Tentang Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014. LN Tahun 2014 No. 7 TLN No. 5495.
Peraturan Pemerintah Tentang Badan Usaha Milik Desa, PP Nomor 11 Tahun 2021. LN No. 21 Tahun 2021 TLN. No. 6623.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Permendesa Nomor 4 Tahun 2015.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Desa Tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa. Permendesa Nomor 3 Tahun 2021

Buku

- Wijaya, David. BUM Desa (Badan Usaha Milik Desa). Jakarta: Gava Media, 2018.
Kohar, A. Notaris dalam Praktik Hukum. Bandung: Penerbit Alumni, 1983.

Artikel Ilmiah

- Sufi, Fayakundia Putra dan Rusdianto Sesung. "Pemisahan Jabatan Umum di Indonesia." *Jurnal Perspektif*. Vol. 22. No. 3 (2017). hlm. 192.
Soemadji, Riani Talitha Nazhiif. "Pendaftaran Badan Usaha Milik Desa Untuk Menjadi Badan Hukum Ditinjau dari Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Cipta Kerja." Tesis Magister Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2022.
Rahayu, Ika. "Legalitas Status Badan Hukum Sebuah Badan Usaha Milik Desa yang Didirikan Tanpa Akta Notaris." *Jurnal Multidisiplin Indonesia*. Vol. 1. No. 4 (2022). hlm. 1223.
Wulansari, Putri dan Fifiana Wisnaeni. "Implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dalam Pembuatan Akta Pendirian Badan Usaha Milik Desa di Kabupaten Tegal." *Notarius*. Vol. 12. No. 1 (2019). hlm. 62-63.

Lain-lain

- Fadli, Zul "Bisakah Notaris Membuat Akta BUMDes," *Medianotaris.com*, 3 Desember 2019. Tersedia pada https://medianotaris.com/bisakah_notaris_membuat_akta_bumdes_berita643.html , diakses pada tanggal 8 Mei 2024.